

**FENOMENA FLYPAPER EFFECT DAN PENGARUHNYA
TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S2
Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh

M.RIMAWAN

121500442

MAGISTER AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2017

FENOMENA FLYPAPER EFFECT DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

M.Rimawan

m.rimawan@yahoo.co.id

Rudy Badrudin

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in Indonesia so far is form of decentralization. Regional autonomy have purpose to realize the independence of the region so it is free to organize themselves without any interference from central government to make their own financial plan and create policies that can affect the progress of the region. Reality shows there are not all regions were able to escape from the central government, due to the different levels of needs of each region.

The purpose of this research is to determine empirically the effect of general allocation fund and local revenues on regional expenditure in regency and city West Nusa Tenggara and determine the possibility of flypaper effect to regional expenditure in regency and city in West Nusa Tenggara in the year 2005-2014

This research was committed with a sample of 8 regencies and 2 cities in West Nusa Tenggara province for the period 2004-2014. Sampling was done by purposive sampling technique. The data are taken from the website of the Financial Department of the Republic Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance. The data which is analyzed in this research are collected through the Region Budget of Revenue and Expense (APBD). The analyzing method that is used is SEM Partial Least Squared.

Based on the research results show general allocation fund and local revenue have positive and significant effect on regional expenditure and occurs flypaper effect in regency and city in West Nusa Tenggara province for the period years 2004-2014. This shows that local governments can't maximize local own revenue to financing regional government expenditure itself

Keyword : flypaper effect, general allocation fund, local government revenue, regional expenditure, economic growth.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sudah semakin pesat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, hal ini terlihat sejak Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan dalam kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan sendiri urusan rumah tangga suatu daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengurus segala kebutuhan dan pengeluaran daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku disebut otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dari kinerja pemerintah daerah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga hasil yang dicapai dapat dimaksimalkan, karena setiap daerah mempunyai karakteristik yang tidak sama.

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Data menunjukkan Proporsi PAD dalam membiayai belanja Pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 % (Purbarini, 2015). Permasalahan yang terjadi saat ini pemerintah daerah selalu menggantungkan DAU untuk membiayai belanja daerah dan belanja pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat periode 2005-2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
periode 2005-2014

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Bima	10,797	19,169	22,047	18,113	19,235	21,147	35,642	43,395	50,668	100,899
Kab. Dompu	8,824	10,616	13,066	16,152	18,761	18,687	28,153	26,297	27,595	75,371
Kab. Lombok Barat	26,902	32,389	36,728	38,656	32,328	49,993	133,284	94,444	110,062	169,109
Kab. Lombok Tengah	14,723	19,197	21,291	26,863	36,233	42,846	59,234	78,445	123,011	140,508
Kab. Lombok Timur	28,667	35,029	31,586	34,904	39,762	39,469	56,005	88,008	97,249	180,308
Kab. Sumbawa	15,809	19,248	20,439	25,913	28,499	35,809	89,056	61,264	67,871	126,129
Kota Mataram	21,340	26,032	28,882	32,829	36,273	44,492	82,300	95,877	139,877	202,585
Kota Bima	3,871	4,970	4,913	6,271	7,225	8,424	10,998	14,166	15,691	21,901

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kab. KSB	2,582	11,124	18,970	16,559	18,104	28,312	115,384	33,687	27,963	42,509
Kab Lombok Utara					10,628	22,376	26,412	35,721	49,620	81,091

Sumber: www.djpk.go.id

Optimalisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat hendaknya didukung oleh upaya daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ketimpangan PAD antara satu dengan daerah yang lainnya pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang menerangkan tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, serta transfer dan perimbangan pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbang). Untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berikut ini data Jumlah DAU Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat tahun 2005 sampai 2014 sebagai berikut:

Table 1.2
Dana Alokasi Umum Kabupatenn/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 2005 – 2014 (dalam juta)

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Bima	203,508	330,942	374,364	421,053	440,301	449,582	515,559	618,722	698,562	771,059
Kab Dompu	139,447	231,810	258,878	284,521	300,007	311,257	340,434	419,778	470,825	521,668
Kab.Lombok Barat	243,894	372,238	424,051	479,218	324,114	409,929	466,323	553,918	612,622	685,319
Kab.Lombok Tengah	260,804	387,044	445,821	508,836	515,662	581,610	589,450	702,815	793,652	865,424
Kab.Lombok Timur	308,859	465,490	522,757	584,249	627,029	619,206	697,127	830,534	932,463	1,039,125
Kab.Sumbawa	179,554	272,557	365,080	416,380	424,698	436,347	495,852	586,148	647,641	724,964
Kota Mataram	167,660	247,245	287,589	301,817	314,246	328,202	366,882	445,894	500,044	564,661
Kota Bima	118,169	183,581	204,865	231,013	234,244	246,393	267,829	329,098	377,378	410,483
Kab.KSB	40,269	103,759	147,770	180,749	173,466	181,740	214,768	259,334	272,959	349,284
Lombok Utara					162,614	229,577	246,357	275,520	314,808	339,993

Sumber : www.djpk.go.id

Belanja daerah yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah disamping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkat kegiatan perekonomian daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Proporsi Belanja Daerah pemerintah daerah dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2014 menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat periode 2005-2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Table 1.3
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 2005 – 2014 (dalam juta)

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Bima	287,701	401,020	490,089	565,237	624,000	662,802	824,750	831,146	958,953	2,159,297
Kab Dompu	190,473	257,413	336,899	395,148	415,106	445,613	523,799	607,757	672,054	1,087,209
Kab.Lombok Barat	311,960	462,061	553,679	653,594	525,543	649,169	836,764	865,505	948,343	727,216
Kab.Lombok Tengah	331,328	437,551	565,517	676,695	694,535	740,514	842,441	971,475	1,254,738	1,371,961
Kab.Lombok Timur	388,400	540,824	660,628	733,569	604,361	935,038	1,083,145	1,160,055	1,356,878	1,624,283
Kab.Sumbawa	249,934	350,876	455,749	570,233	604,361	666,524	798,243	848,935	912,950	1,028,379
Kota Mataram	236,517	319,399	420,449	446,051	465,621	535,677	670,216	740,283	883,522	1,044,356
Kota Bima	150,588	228,680	216,980	330,081	332,667	364,785	472,856	472,856	533,361	605,209
Kab. KSB	87,252	220,312	345,874	320,669	439,181	458,545	506,414	507,082	509,808	601,748
Kab.Lombok Utara					186,804	346,525	378,262	428,342	514,257	549,858

Sumber : www.djpk.go.id

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).

Menurut Sukirno (1996, 33), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Proporsi pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2014 menunjukkan trend yang fluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat periode 2005-2014 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Table 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupatenn/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Periode 2005 – 2014

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Bima	1.37	4.26	4.56	6.09	6.46	4.54	6.05	5.95	5.11	6.01
Kab Dompu	2.38	4.11	4.97	4.11	5.29	4.57	7.20	6.18	5.05	6.13
Kab.Lombok Barat	4.07	5.56	5.14	4.54	6.25	7.74	6.05	5.27	5.26	5.48
Kab.Lombok Tengah	4.30	5.09	4.71	6.97	7.28	5.66	10.89	13.72	6.24	6.28
Kab.Lombok Timur	4.57	4.69	5.09	5.49	5.73	5.01	6.23	5.43	5.51	4.79
Kab.Sumbawa	4.03	4.68	4.79	4.88	5.45	5.94	6.97	6.67	6.44	6.61
Kota Mataram	7.77	7.93	8.00	7.76	8.46	7.95	2.96	1.04	7.95	8.10
Kota Bima	3.41	4.75	5.97	14.03	14.86	12.77	5.12	5.60	5.58	5.87
Kab. KSB	4.32	6.99	6.74	7.27	8.06	6.79	(28.18)	(26.27)	3.53	107.07
Kab.Lombok Utara							(3.91)	(1.54)	5.16	5.06

Sumber www.djpk.go.id

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Apakah Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
4. Apakah terjadi Flypaper Effect pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Belanja Daerah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat baik dari segi teori maupun terapan antara lain:

4. Manfaat Teori, sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengambil penelitian dan studi pustaka tentang Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Daerah.
5. Manfaat empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.
6. Manfaat Kebijakan, memberikan bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi. Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *principal agent*. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan

Teori Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Pelaksanaan otonomi daerah mengamanatkan bahwa tujuannya adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Menurut Handayani dan Badrudin (2007) Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian keuangan daerah berdasarkan kemampuan menggali dan mengelola keuangannya. Menurut Saragih (2003) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Kurnia, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan pada bagian perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desentralisasi menurut Yustika (2008) menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan secara social dan ekonomi.

Teori Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004), sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai pertambahan nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.

Dana Perimbangan

Pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Perimbangan dan Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyusuaian, maka mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan Transfer ke daerah.

Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasi kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah, dana alokasi umum yang berupa komponen terbesar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah serta dana alokasi khusus yang bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Halim (2004: 96), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Septiana (2007) pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke kas daerah, yang diatur dengan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian Setiyawati (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Arsyad (1999: 11), pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat Pengaruh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAU, DAK, PAD, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jumlah stok barang-barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan.

Flypaper Effect

Istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Ru binfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “*money sticks where it hits*”. *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

Maimunah (2006) mengatakan bahwa *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan dimana pemerintah daerah lebih banyak membelanjakan dan lebih boros menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibanding menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengembangan Hipotesis

1. Pendapatan asli daerah dan belanja daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat

Kewenangan Pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan dalam belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan Prakosa (2015), Al Khoiri (2015), Hardiyanto (2014), Hartati (2009) berhasil membuktikan bahwa variabel PAD berpengaruh Positif terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam belanja daerah. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja daerah harus disesuaikan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD sebesar-besarnya. Berdasarkan penjelasan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

2. Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu jenis dana perimbangan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah. Dana perimbangan khususnya DAU dapat memberikan kepastian bagi setiap daerah untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk membiayai semua kegiatan dan belanja yang menjadi tanggung jawab daerahnya (Darmayasa dan Suandi, 2014). Dasar pengalokasian DAU yaitu *fiscal gap* suatu daerah. Daerah yang memiliki *fiscal gap* kecil, maka akan mendapat distribusi DAU yang kecil juga, demikian sebaliknya. Pengalokasian DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerahnya agar lebih efisien. Daerah yang memiliki jumlah PAD yang masih rendah tentu akan mengandalkan transfer dari pemerintah pusat ini untuk membiayai belanja modal daerahnya.

Penelitian yang dilakukan Kusumadewi dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), berhasil membuktikan bahwa variabel DAU berpengaruh Positif terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya DAU menjadi salah satu faktor penentu dalam belanja daerah mengindikasikan jika ketergantungan daerah sangat tinggi terhadap DAU untuk membiayai belanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikembangkan hipotesis:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

3. Belanja daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Halim (2002 : 68), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja sebagai komponen pengeluaran daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

aktivitas ekonomi yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilkauan oleh Mawarni, Darwanis, Abdullah (2016), Deviani (2016), Siska (2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikembangkan hipotesis:

H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

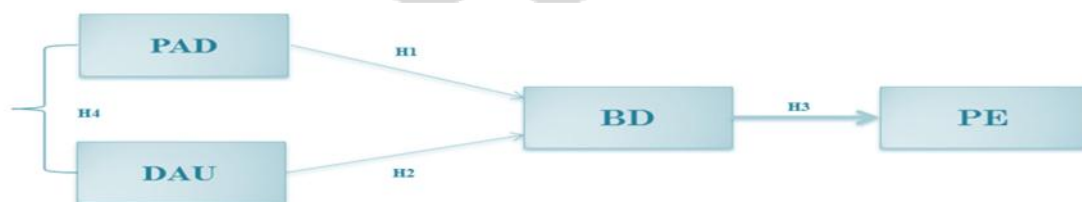
4. Terjadi *flypaper effect* di kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Oates (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*. menurut Maimunah (2006), *flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan dengan dana transfer yang diproksikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.

Sementara itu Halim dan Syukiri (2003), Kuncoro (2004), Maemunah (2006), Masdjojo dan Sukanto (2009), Aprilia dan Saputra (2013) mencoba meneliti *flypaper effect* Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis menfomulasikan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terjadi Fenomena *flypaper effect* terhadap pada Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

KERANGKA PENELITIAN



Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
BD = Belanja Daerah
PE = Pertumbuhan Ekonomi

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri 8 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2005 sampai tahun 2014 dipilih karena implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, sehingga dirasa masih akan terjadi banyak masalah dalam pengimplementasiannya. Maka diharapkan pada tahun 2005 dalam pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diolah dan diperoleh oleh peneliti dari pihak perusahaan maupun luar perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data yang digunakan berupa data *time series* dan *cross sectional* antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Data penelitian ini bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui www.djpk.depkeu.go.id periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan alat statistik SEM PLS dengan Warp PLS

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah sedangkan variabel bebas (*independent variabel*) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Definisi oprerasional adalah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun anggaran 2005 sampai dengan 2014 dengan satuan rupiah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel DAU yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran 2005 sampai dengan 2014 dengan satuan rupiah.

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

3. Belanja Daerah (BE)

Belanja Daerah adalah semua kewajiban kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja daerah yang terdiri dari belanja Langsung dan belanja tidak langsung dengan periode tahun anggaran 2005 sampai dengan 2014 dalam satuan rupiah.

BE = Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

5. Flypaper effect

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grant*) yaitu DAU dibandingkan dengan menggunakan kemampuan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Analisis dengan menggunakan Belanja Daerah

Table 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

	Pendapatan Asli Daerah (dalam Jutaan)	Dana Alokasi Umum (dalam Jutaan)	Belanja Daerah (dalam Jutaan)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Mean	45.228	407.514	610.432	6
Minimum	2.582	40.269	87.252	-28
Maxsimum	202.585	1.039.125	2.159.297	107

Sumber: Output (Olah Data)

Analisis Partial Least Square

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menghitung nilai Goodness of Fit dan melakukan pengujian hipotesis

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

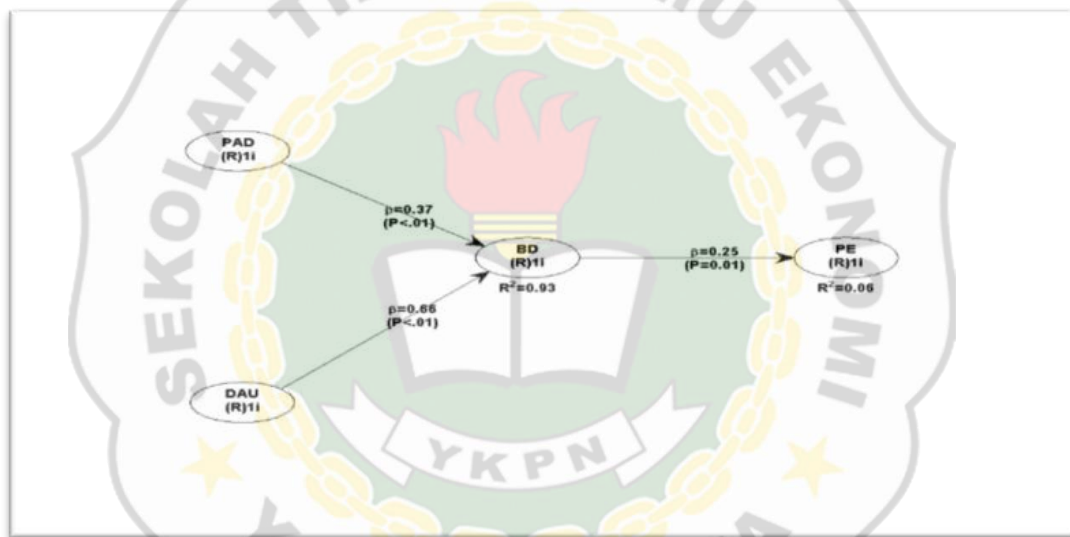
Perhitungan Goodness of Fit

Tabel 4.2

Penilaian Goodness of Fit

Hasil	P value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.426	$P < 0.001$	Good If $P < 0,05$	Diterima
ARS = 0.499	$P < 0.001$	Good If $P < 0,05$	Diterima
AVIF = 2.363		$P < 5$	Diterima

Pengujian Hipotesis



Sumber: Hasil out put pengujian hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.37 (positif) yang menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap BD. Tingkat signifikansinya sebesar $<0,01$ yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BD. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi hasil dari belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nilai koefisien (β) sebesar 0.66 (positif) yang menunjukkan DAU berpengaruh positif terhadap BD. Tingkat signifikansinya sebesar $<0,01$ yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BD. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum dapat mempengaruhi hasil dari belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien (β) sebesar 0.25 (positif) yang menunjukkan BD berpengaruh positif terhadap PE. Tingkat signifikan sebesar 0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti BD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PE. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H3 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Terjadi fenomena flypaper effect di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa proksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dari proksi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien (β) dana alokasi umum sebesar 0.66 sedangkan koefisien (β) pendapatan asli daerah sebesar 0.37 dan memiliki nilai tingkat signifikan sama-sama 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan 5% atau 0,05 yang berarti PAD dan DAU sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H4 diterima, hal ini menunjukkan terjadi fenomena *Flypaper effect* di pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Analisis dengan menggunakan Belanja Modal

Perhitungan Goodness of Fit

Tabel 4.2

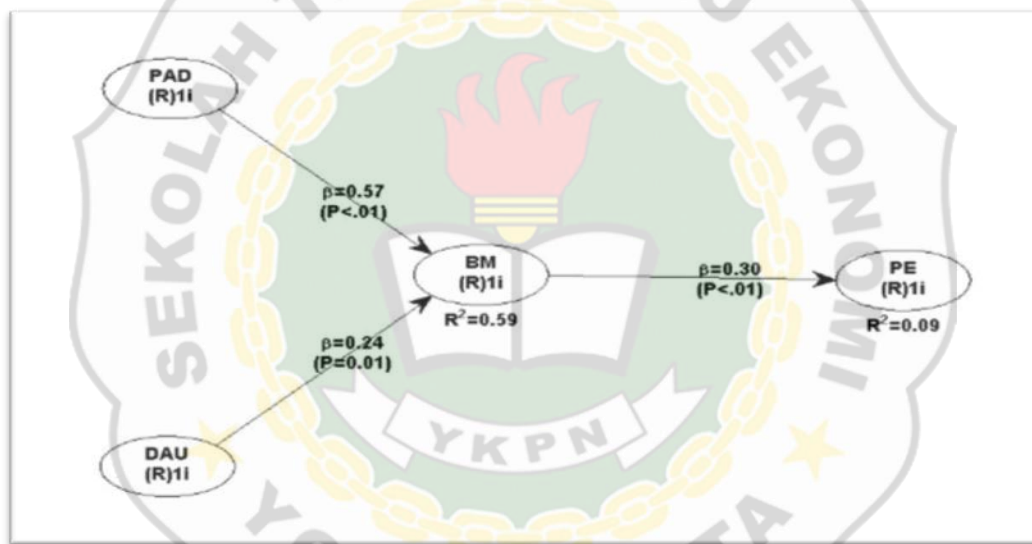
Penilaian Goodness of Fit

Hasil	P Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.369	$P < 0,001$	Good if $P < 0.05$	Diterima
ARS = 0.341	$P < 0,001$	Good if $P < 0.05$	Diterima

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AVIF = 2.679		P < 5	Diterima
--------------	--	-------	----------

Pengujian Hipotesis



Hasil output pengujian hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.57 (positif) yang menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap BM. Tingkat signifikansinya sebesar $< 0,01$ yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BM. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi hasil dari belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil pengujian bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.24 (positif) yang menunjukkan DAU berpengaruh positif terhadap BM. Tingkat signifikansinya sebesar $<0,01$ yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BM. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum dapat mempengaruhi hasil dari belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien (β) sebesar 0.30 (positif) yang menunjukkan BM berpengaruh positif terhadap PE. Tingkat signifikan sebesar 0,01 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05 yang berarti BM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PE. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H3 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Terjadi fenomena flypaper effect di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil pengujian bahwa proksi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal lebih besar dari proksi dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien (β) dana alokasi umum sebesar 0.24 sedangkan koefisien (β) pendapatan asli daerah sebesar 0.57 dan memiliki nilai tingkat signifikan sama-sama 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan 5% atau 0,05 yang berarti PAD dan DAU sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa **H4 ditolak**, hal ini menunjukkan tidak terjadi fenomena Flypaper effect di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembahasan Model 1 dengan Belanja Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.37 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karena kalau belanja daerah mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Hartati (2009), Prakosa (2015), Al Khoiri (2015), dan Hediyanto (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

2. Dana Alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.66 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja daerah karena kalau belanja daerah mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini mendukung penelitian sebelumnya Kusuma dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU.

3. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Belanja Daerah adalah semua kewajiban kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja daerah yang terdiri dari belanja Langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.25 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang berbunyi belanja daerah berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah didukung. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai belanja daerah maka akan menyebabkan peningkatan pula pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

capaian pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja daerah. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja daerah yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi akan mampu menjadi *trigger*/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ini mendukung penelitian sebelumnya Deviani (2016), Siska (2016) yang mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana bahwa belanja daerah salah satu faktor penentu naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

4. Terjadi *flypaper effect* kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat

Fenomena *flypaper effect* Berdasarkan hasil pengujian bahwa proksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dari proksi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari koefisien (β) dana alokasi umum sebesar 0.66 sedangkan koefisien (β) pendapatan asli daerah sebesar 0.37 dan memiliki nilai tingkat signifikan sama-sama 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan 5% atau 0,05 yang berarti proksi DAU lebih besar daripada proksi PAD sehingga dikatakan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah sangat besar terhadap pemerintah pusat demi terlaksananya otonomi daerah dengan tujuan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis keempat ini mendukung penelitian sebelumnya Kuncoro (2004), Maemunah (2006), Masdjojo dan Sukanto (2009), Afrizawati (2012), Aprilia dan Saputra (2013), Sidiq (2016) yang menyatakan bahwa dana transfer dalam hal ini DAU lebih besar dari PAD sehingga terjadi Fenomena *Flypaper Effect*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan menganalisis fenomena *flypaper effect* di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pembahasan pada bab empat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan bahwa PAD sudah dapat mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena pemerintah daerah sudah mampu mengelola potensi-potensi daerahnya secara efektif.
2. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan bahwa DAU sudah dapat mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena pemerintah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah sangat terikat pada transfer pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan belanja daerah sehingga menciptakan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan bahwa BD sudah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena salah satu penentu naik turunnya pertumbuhan ekonomi adalah Belanja daerah. Semakin besar belanja daerah semakin meningkatkan aktivitas ekonomi seperti pemenuhan barang dan jasa, perbaikan infrastruktur dan meningkatkan investasi.
4. Terjadi *Flypaper effect* karena Proksi DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada Proksi PAD terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan sifat borosnya pemerintah daerah dalam mensikapi transfer dana dari pada mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Saran dan keterbatasan

Saran untuk penelitian-penelitian yang akan datang adalah:

1. Berdasarkan kesimpulan keempat yang menyatakan ada terjadinya flypaper effect oleh karena itu peneliti berikutnya dapat menambah data primer seperti variabel opportunistik legislatif dan latar belakang legislatif, karena terjadi hubungan keagenan pemerintah sebagai eksekutif menyusun anggaran dan akan dievaluasi oleh legislatif, Serta peran legislatif yang sangat besar dalam penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan-kebijakan dan pengesahan anggaran sehingga bisa mengindikasikan sikap korupsi dalam penyusunan anggaran.
2. Pada peneliti berikutnya agar menambahkan variabel kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mendapatkan hasil pembangunan yang Inklusif
3. Menempatkan Flypaper effect sebagai variabel Independen

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. “Analisis Flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol 2 No.1*.
- Salawali, Wiwin Anggriani., Kindangen, Paulus and Agnes L.Ch. P. Lapien 2015 Flypaper effect pada dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) serta pengaruhnya terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado*
- Al Khoiri, Rifki Hasan. 2015. “Flypaper effect dan belanja daerah di Provinsi Jawa Barat “. *Jurnal Signifikan vol. 4 no. 2, oktober 2015*
- Aprilia, Nita dan Saputra, Redo Arian. 2013. *Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2*
- Ash Shiddieqy, Hasnan dan Rizki Amalia Afriana 2013 “*Flypaper effect* pada dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah pada kota dan kabupaten di pulau Kalimantan, Stie Nasional Banjarmasin *Dinamika Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6.No.2 September 2013*
- Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martinez-Vazquez. 2002. An Analysis of Indonesia’s Transfer System: Recent Performance and Future Prospects. *Working Paper Volume 2, Nomor 13, May 2002. Georgia State University.*
- Deviani. 2016. Analisis belanja daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (studi empiris kota dan kabupaten di sumatera barat) Universitas Negeri Padang. *Pekbis Jurnal, Vol.8, No.1, Maret 2016 : 1-13*
- Hartati. 2009 *Flypaper Effect* pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis. Program Pasca Sarjana S-2 Universitas Sebelas Maret. Surakarta.*
- Kuncoro, Haryo. 2007 “Fenomena *Flypaper effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia” The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia: 1-29, <http://www.feui.ac.id>
- Kurnia, Eka Daddy. 2013. “Analisis Flypaper effect berdasarkan pemetaan indeks kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi (Studi kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. “*Fypaper Effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia “. *JAAI, Juni 2007, Vol. 11, No.1, pp. 67-80.*
- Maimunah, Mutiara, 2006, *Flypaper effect* pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi, IX 23-26 Agustus 2006, Padang*
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.
- Masdjoko, Gregorius N. dan Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen, Vol.6 Edisi 1.*
- Mawarni, Darwanis, dan Abdullah. 2013. “Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh).” *ISSN 2302-0164. Volume 2, No.2, Mei 2013: 80- 90.*
- Pramuka, Bambang Agus. 2010. “Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa“. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*
- Purbarini, Endah. Gregorius, N. Masdjoko. 2015. “Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni, 75-84.*
- Purnomo, Hermawan Bayu. 2011. “Flypaper Effect pada pengeluaran transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Kalimantan Tahun 2007-2010”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “.Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY”. *JAAI, Vol 08 No.2*
- Putri, Anggraeni Siska dan Cahyono Hendri, 2016. “Pengaruh belanja daerah dan Pmdm terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur” *jurnal pendidikan ekonomi, Universitas Negeri Surabaya*
- Rokhaniyah, Siti. dan Nugroho, Muh Rudi. (2011). Analisis *Flypaper Effect* pada belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008. *Fokus Ekonomi, Vol.10 No.2.*
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari, 2007, “Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah mengalami pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota seJawa-Bali)”, *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Sidik, Machfud; Hidayanto, Djoko; Ismail, Tjip; Kadjatmiko; Pakpahan, Arlen Tobana; Adriansyah, 2004, *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*, Direktorat Jenderal Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sidiq, Muhamad 2016 “analisis *flypaper effect* berdasarkan Indeks kemampuan keuangan (ikk) Pada kabupaten dan kota di Indonesia. *Tesis* Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung

Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

